

# Akuntansi & Manajemen

Vol.10, No.2, Maret 2016

ABD. HARIS LONGI

ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN/KEPAILITAN PERUSAHAAN

DARWIS LANNAI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM KAJIAN FENOMENOLOGI PADA PT BANK SULSELBAR

MUHAMMAD CARDA P

PENGARUH FUNGSI PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PASTA GIGI PEPSODENT

NUR WAHYUNI

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASAR SELATAN

NURAENI RASYID

PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA CABANG MAKASSAR

RINA

FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KONSUMEN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR SUZUKI PADA PT. SINAR GALESONG PRATAMA DI MAKASSAR

SENIORITAS

PENGARUH KOMPETENSI, KOMPLESITAS AUDIT DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT

SUMARNI S

ANALISIS LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA PT. OKISHINF FLORES DI NUSA TENGGARA TIMUR

SURIANTO

PENGARUH PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK BRI (PERSERO), TBK CABANG MAKASSAR

HAMZAH ELLAH

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK BRI SYARIAH MAKASSAR

MUCHTAR LAMO

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT

SUBHAN

PENGARUH PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT BONTOPOLE



Diterbitkan  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(LP2M)  
UNIVERSITAS PATRIA ARTHA

**JURNAL**

ISSN 1907 - 0292

# Akuntansi & Manajemen

**Vol.10, No.2, Maret 2016**

- |                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABD. HARIS LONGI</b> | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN/KEPAILITAN PERUSAHAAN                                                                                               |
| <b>DARWIS LANNAI</b>    | AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM KAJIAN FENOMENOLOGI PADA PT BANK SULSELBAR                                               |
| <b>MUHAMMAD CARDA P</b> | PENGARUH FUNGSI PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PASTA GIGI PEPSODENT                                                                       |
| <b>NUR WAHYUNI</b>      | PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASAR SELATAN |
| <b>NURAENI RASYID</b>   | PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA CABANG MAKASSAR                            |
| <b>RINA</b>             | FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KONSUMEN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR SUZUKI PADA PT. SINAR GALESONG PRATAMA DI MAKASSAR                     |
| <b>SENIORITAS</b>       | PENGARUH KOMPETENSI, KOMPLESITAS AUDIT DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT                                                           |
| <b>SUMARNI S</b>        | ANALISIS LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA PT. OKISHINF FLORES DI NUSA TENGGARA TIMUR                                                             |
| <b>SURIANTO</b>         | PENGARUH PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK BRI (PERSERO), TBK CABANG MAKASSAR                     |
| <b>HAMZAH ELLAH</b>     | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK BRI SYARIAH MAKASSAR                                                       |
| <b>MUCHTAR LAMO</b>     | PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT                                                                               |
| <b>SUBHAN</b>           | PENGARUH PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT BONTOPOLE                                   |



Diterbitkan  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS PATRIA ARTHA

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MAKASSAR SELATAN**

**NUR WAHYUNI**

Dosen Universitas Muslim Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2012-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil uji hipotesis secara simultan (F-test) membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 0.199 atau 19.9% yang artinya 19.9% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 80.1% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

**Kata kunci:** *Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan yang bersumber dari luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah melakukan reformasi di bidang perpajakan, dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-

baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangandan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2015

| TAHUN | JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK |
|-------|------------------------|
| 2012  | 57.022.472.882         |
| 2013  | 108.030.454.071        |
| 2014  | 108.038.836.263        |
| 2015  | 154.537.029.101        |

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2012 sampai 2015, yaitu pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 57.022.472.882 selanjutnya, pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak menjadi Rp 108.030.454.071 dan tahun 2014 juga terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak menjadi Rp 108.038.836.263 , tahun 2015 jumlah tunggakan pajak menjadi Rp 154.537.029.101. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Salah satu cara untuk mencairkan tunggakan pajak adalah dengan kegiatan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian

diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

#### Rumusan Masalah

1. Apakah surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Apakah surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Pengertian Pajak

Waluyo (2008) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Resmi (2009) pajak adalah peralihan kekayaan rakyat dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

##### Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

##### Jenis-Jenis Pajak

Mardiasmo (2011:5) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Sifatnya
  1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Menurut Golongannya
  1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
  1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
  2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:
    - a) Pajak Propinsi  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - b) Pajak Kabupaten/Kota  
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

### Surat Teguran

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Penerbitan surat teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai surat paksa, seperti yang

diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis." Sementara ayat (2) menyatakan "Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran".

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Apabila terdapat Wajib Pajak tidak pernah diberikan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, maka secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Prasetyo (2014) surat paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim". Sedangkan Surat Paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwenang dalam menerbitkan surat paksa, yang intinya memerintahkan kepada wajib pajak (penanggung pajak) yang mempunyai utang pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Akan tetapi di dalam hukum pajak Surat Paksa disebut *parate executie*, artinya dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan.

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak selama 4 tahun terakhir (2012-2015) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Cara pemilihan sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan

(Ulwan, 2014). Syarat sampel yaitu sebagai berikut:

1. Data tunggakan pajak wajib pajak tersedia
2. Memiliki data lengkap dan pernah dikirim surat teguran
3. Pernah dikirim surat paksa.

Berdasarkan kriteria sampel diatas, dilakukan pemilihan sampel sesuai tabel 3 berikut:

Tabel 2. Pemilihan Sampel

| No.    | Syarat Sampel                    | Jumlah                                                                    |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Wajib pajak yang menunggak pajak | Wajib pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendahara Pemerintah sebanyak 13.116 |
| 2      | Memenuhi syarat 2                | 5.697                                                                     |
| 3      | Memenuhi syarat 3                | 1.218                                                                     |
| Sampel |                                  | 6.915                                                                     |

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, data yang

diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait.

### Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif

dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Statistical Product and*

*Service Solution (SPSS)*. Rumus linear berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub> = Koefisien surat teguran
- b<sub>2</sub> = Koefisien surat paksa
- X<sub>1</sub> = Surat teguran
- X<sub>2</sub> = Surat paksa
- e = Faktor pengganggu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan serta pencairan tunggakan

pajak yang dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dari tahun 2012 sampai 2015.

Tabel 2.

Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan, Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan dan Pencairan Tunggakan Pajak (Tahun 2012-2015)

(dalam ribuan rupiah)

| BULAN          | JUMLAH SURAT<br>TEGURAN YANG DI<br>TERBITKAN (X <sub>1</sub> ) | JUMLAH SURAT<br>PAKSA YANG DI<br>TERBITKAN<br>(X <sub>2</sub> ) | PENCAIRAN<br>TUNGGAKAN<br>(Y) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Januari (2012) | 186                                                            | 16                                                              | 280.723.505                   |
| Februari       | 70                                                             | 19                                                              | 317.437.046                   |
| Mei            | 283                                                            | 7                                                               | 205.345.033                   |
| Juli           | 30                                                             | 35                                                              | 40.567.590                    |
| Agustus        | 100                                                            | 33                                                              | 249.260.785                   |
| September      | 26                                                             | 14                                                              | 12.043.958                    |
| Oktober        | 201                                                            | 47                                                              | 842.634.601                   |
| November       | 159                                                            | 32                                                              | 294.852.745                   |

(dalam ribuan rupiah)

| BULAN          | JUMLAH SURAT<br>TEGURAN YANG<br>DITERBITKAN ( $X_1$ ) | JUMLAH SURAT<br>PAKSA YANG<br>DITERBITKAN ( $X_2$ ) | PENCAIRAN<br>TUNGGAKAN<br>(Y) |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Januari (2013) | 146                                                   | 11                                                  | 2.189.571.289                 |
| Maret          | 181                                                   | 83                                                  | 1.168.206.991                 |
| April          | 98                                                    | 43                                                  | 1.959.196.752                 |
| Mei            | 59                                                    | 31                                                  | 62.211.210                    |
| Juni           | 144                                                   | 31                                                  | 251.096.057                   |
| Juli           | 26                                                    | 50                                                  | 691.546.463                   |
| Agustus        | 118                                                   | 13                                                  | 56.886.000                    |
| September      | 136                                                   | 3                                                   | 174.105.281                   |
| Oktober        | 23                                                    | 2                                                   | 8.620.000                     |
| November       | 106                                                   | 26                                                  | 182.104.292                   |
| Desember       | 204                                                   | 28                                                  | 221.139.344                   |

(dalam ribuan rupiah)

| BULAN          | JUMLAH SURAT<br>TEGURAN YANG<br>DITERBITKAN<br>( $X_1$ ) | JUMLAH SURAT<br>PAKSA YANG<br>DITERBITKAN<br>( $X_2$ ) | PENCAIRAN<br>TUNGGAKAN<br>(Y) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Januari (2014) | 186                                                      | 13                                                     | 2.045.744.355                 |
| Februari       | 114                                                      | 62                                                     | 668.012.600                   |
| Maret          | 42                                                       | 27                                                     | 320.620.985                   |
| April          | 21                                                       | 17                                                     | 258.038.463                   |
| Mei            | 137                                                      | 6                                                      | 1.178.156.623                 |
| Juni           | 132                                                      | 28                                                     | 830.817.255                   |
| Agustus        | 50                                                       | 61                                                     | 1.002.008.866                 |
| September      | 67                                                       | 39                                                     | 208.811.425                   |
| Oktober        | 150                                                      | 1                                                      | 15.281.205                    |
| November       | 82                                                       | 64                                                     | 178.169.587                   |

|          |     |    |           |
|----------|-----|----|-----------|
| Desember | 402 | 27 | 6.300.000 |
|----------|-----|----|-----------|

(dalam ribuan rupiah)

| BULAN          | JUMLAH SURAT<br>TEGURAN YANG<br>DITERBITKAN<br>( $X_1$ ) | JUMLAH SURAT<br>PAKSA YANG<br>DITERBITKAN<br>( $X_2$ ) | PENCAIRAN<br>TUNGGAKAN<br>(Y) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Januari (2015) | 213                                                      | 20                                                     | 1.732.495.577                 |
| Februari       | 32                                                       | 29                                                     | 866.987.211                   |
| Maret          | 107                                                      | 45                                                     | 4.146.680.628                 |
| April          | 46                                                       | 50                                                     | 425.191.132                   |
| Mei            | 374                                                      | 31                                                     | 189.328.508                   |
| Juni           | 233                                                      | 34                                                     | 2.792.461.783                 |
| Juli           | 79                                                       | 14                                                     | 61.624.115                    |
| Agustus        | 16                                                       | 30                                                     | 304.736.695                   |
| September      | 175                                                      | 43                                                     | 125.132.616                   |
| Oktober        | 10                                                       | 25                                                     | 292.052.854                   |
| November       | 529                                                      | 14                                                     | 1.098.139.424                 |
| Desember       | 204                                                      | 14                                                     | 16.834.414                    |

Sumber : Seksi Penagihan KPP Makassar Selatan (data diolah)

**Pengujian Hipotesis**

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variable disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**  
Descriptive Statistics

|                     | N  | Mean    | Std. Deviation |
|---------------------|----|---------|----------------|
| Pencairan Tunggakan | 42 | 19.4006 | 1.60901        |
| Surat Teguran       | 42 | 4.5621  | .92117         |
| Surat Paksa         | 42 | 3.0831  | .91704         |
| Valid N (listwise)  | 42 |         |                |

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 42 sampel atau sama dengan 6.915

wajib pajak yang menunggak pajak. Selain itu, dalam tabel tersebut menunjukkan:

Rata-rata jumlah penerimaan tunggakan pajak adalah 19.4006 dengan standar deviasi 1.60901

Rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan adalah 4.5621 dengan standar deviasi 0.92117

Rata-rata jumlah surat paksa yang diterbitkan adalah 3.0831 dengan standar deviasi 0.91704

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS 17 diperoleh output sebagai berikut

Tabel 4.  
Output Regresi Linier Berganda

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant)              | 15.733                      | 1.443      |                           | 10.906 | .000 |
| Surat Teguran             | .302                        | .251       | .173                      | 1.205  | .236 |
| Surat Paksa               | .743                        | .252       | .423                      | 2.948  | .005 |

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda:

$$Y = 15.733 + 0.302X_1 + 0.743X_2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bagaimana pengaruh surat teguran ( $X_1$ ) dan surat paksa ( $X_2$ ) terhadap pencairan tunggakan pajak ( $Y$ ). Hasil diatas memberikan pemahaman bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat teguran dan surat paksa maka besarnya pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar 15.733 berdasarkan nilai konstanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi surat teguran ( $b_1$ ) = 0.302 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 0.302 satuan. Demikian pula dengan nilai koefisien regresi surat paksa ( $b_2$ ) = 0.743 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan surat paksa maka akan meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 0.743 satuan.

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (t-test)

Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut ini akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial.

#### a. Variabel surat teguran ( $X_1$ )

Berdasarkan tabel 12 terlihat nilai signifikansi surat teguran = 0.236 > 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

#### b. Variabel surat paksa ( $X_2$ )

Berdasarkan tabel 12 terlihat nilai signifikansi surat paksa = 0.005 < 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hal ini berarti jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

#### Uji Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk

mendapatkan hasil yang menyakinkan maka akan dilakukan pengujian  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. Output Uji F  
ANOVA<sup>b</sup>

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 21.170         | 2  | 10.585      | 4.858 | .013 <sup>a</sup> |
| Residual     | 84.975         | 39 | 2.179       |       |                   |
| Total        | 106.145        | 41 |             |       |                   |

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4.858 > 3.24$ ) maka  $H_0$  ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak secara simultan. Selain itu dapat dilihat nilai signifikansi =  $0.013 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak atau dapat dikatakan koefisien regresi signifikan.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6.  
Output Pengujian Koefisien Determinasi  
Model Summary

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .447 <sup>a</sup> | .199     | .158              | 1.47609                    |

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada hasil perhitungan SPSS, diperoleh angka R square ( $R^2$ ) adalah 0.199 yang berarti 19.9% pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 80.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji normalitas menunjukkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga disimpulkan bahwa data yang diolah adalah

data yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi.

Berdasarkan uji multikolinieritas membuktikan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas membuktikan bahwa variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (*Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*) dapat

disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan uji parsial (t-test) dibuktikan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sedangkan, jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Fadmawati (2012) setelah melakukan pengolahan data peneliti menyimpulkan bahwa penagihan dengan surat paksa dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajaknya.

Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (F-test), dibuktikan bahwa jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Sementara itu, dari hasil penelitian dibuktikan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya.

### Saran

1. Melakukan kegiatan penyuluhan pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
2. Melaksanakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan harapan dapat mengurangi tunggakan dan meningkatkan penerimaan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel

atau menambah variabel independen lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Danis, M. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal Perpajakan, Vol. 3 No. 1, Desember 2014.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010*.

Evi, F. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Universitas STIE MDP. Palembang

Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok - Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)*. Bumi Aksara. Jakarta.

Helsi, H. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Bandung*. Jurnal Ekonomi Universitas Telkom. Bandung.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.

Marduati A. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.

Prasetyo, A. 2014. *Surat Paksa*, (Online), (<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=627> di akses 25 Oktober 2015).

Pudyatmoko, S. 2008. *Hukum Pajak*. Andi. Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.

Resmi, S. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Keempat)*. Salemba Empat. Jakarta

Republik Indonesia. 2007. *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah*

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Saupadang, R Fadmawaty. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Makassar

Soemitro, Rochmat. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 10, Hal 101-120.

Ulwan, N. 2014. *Mengambil Sampel dengan Teknik Purposive Sampling*, (Online), (<http://portal-statistik.blogspot.com/2014/02/teknik-pengambilan-teknik> diakses 10 November 2015).

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta